

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dengan tujuan ***“Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Asset secara Tertib, Akuntabel dan Transparan”***, maka sebagai penjabaran RPJMD Kota Singkawang disusun RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

RENSTRA dimaksud disusun dan memuat tentang Tujuan, Sasaran dan Program Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Selanjutnya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kota Singkawang setiap tahunnya.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Singkawang, Juli 2020

Plt.Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

Drs.Zulhiar
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198908 1 001

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH.....	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD.....	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	52

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	57
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah.....	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,SERTA PENDANAAN	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
BAB VIII PENUTUP.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

penyusunan Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018–2022 mengacu pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018–2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Namun dalam perjalanannya selama 2 tahun diberlakukannya RPJMD Kota Singkawang yaitu Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah terjadi berbagai dinamika terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan kebijakan pemerintah pusat lainnya sehingga berakibat kurang relevannya lagi asumsi dan perkiraan yang dijadikan dasar dalam menyusun RPJMD sebelumnya.

Sejalan dengan itu maka Badan Keuangan Daerah perlu melakukan Revisi Penyusunan Renstra untuk mengadaptasi perubahan



RPJMD Kota Singkawang yang yaitu penyempurnaan dan penyesuaian secara rinci pada Bab-bab Renstra Berikutnya, penyesuaian berdasarkan perubahan RPJMD Kota Singkawang meliputi strategi, arah kebijakan, Program serta indikator dan target kinerja untuk 3 (tiga) tahun kedepan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
23. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2 No. Reg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 2-75/2019);



33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
35. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1); dan
36. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 adalah:

1. Untuk menyusun Perencanaan tahun anggaran 2021-2022
2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan- kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD Perubahan;
3. Sebagai titik awal menjalankan isi dari Perubahan RPJMD kota Singkawang ;



4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Revisi Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 adalah:

1. Agar pencapaian Kinerja Setiap Program Kegiatan di Badan Keuangan Daerah lebih terukur
2. Mengimplementasikan Amanat Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018–2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan



Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Bab V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Kebijakan



Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, dibentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik yang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional, memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah



(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), merupakan landasan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang merupakan Tugas Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas **“Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”**.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan Daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan Daerah.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan Daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang Keuangan Daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pajak dan Retribusi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pengendalian Pajak Retribusi dan Pendapatan Daerah
4. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pengendalian
5. Bidang Anggaran terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Rencana Anggaran
 - b. Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Anggaran
6. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Pencairan Dana
 - b. Sub Bidang Pengelolaan dan Penggajian
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :



- a. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi Pertanggungjawaban
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Pengendalian
8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan Aset
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Aset
9. Unit Pelaksanaan Teknis, dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang keuangan daerah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsipenunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dengan melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Badan;
- d. penyelenggaraan pelayananan administrative meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program serta pengelolaan keuangan badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.



- 2) Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Anggaran meliputi Rencana Anggaran, Analisa dan Pengendali Anggaran.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Anggaran;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Rencana Anggaran;
 - c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Analisa dan Pengendali Anggaran;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Sub bidang pada Bidang Anggaran;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.



- 2) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan meliputi pengendalian dan pencairan dana serta pengelolaan penggajian.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan pencairan dana;
 - c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan penggajian;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Sub bidang pada Bidang Perbendaharaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pembukuan

Bidang Akuntansi dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan



teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan meliputi akuntansi, verifikasi pertanggungjawaban, pelaporan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerjabidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaporan dan pengendalian;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Sub bidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja,menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan pengadaan dan penggunaan, pendayagunaan aset dan penatausahaan aset.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pengadaan dan penggunaan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendayagunaan aset;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penatausahaan aset;
- e. Pengeordinasian pelaksanaan tugas-tugas Sub bidang pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pajak dan Retribusi

Bidang Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pajak dan retribusi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penetapan dan penagihan wajib pajak daerah;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah;
- e. Pengeordinasian pelaksanaan tugas-tugas Sub bidang pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang PBB dan BPHTB meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian PBB dan BPHTB.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PBB dan BPHTB;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pembukuan dan Pengendalian PBB dan BPHTB;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Sub bidang pada Bidang PBB dan BPHTB; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Unit Pelaksanan Teknis Badan

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud terdiri dari:

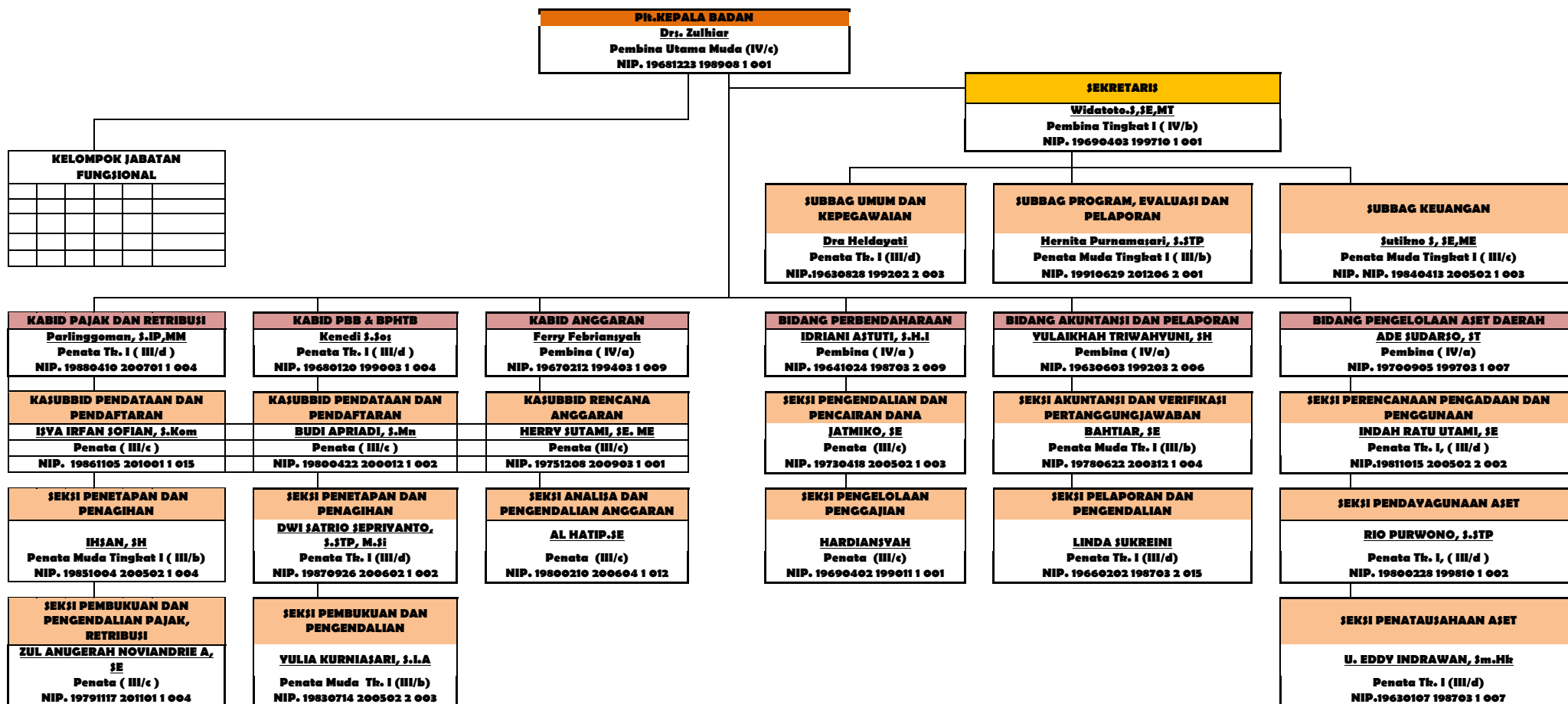
- a. Atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan



- fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.



Tabel 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG





2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang perlu adanya dukungan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai, adapun sumberdaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan berjumlah 65 orang dengan rincian :

a. Pegawai menurut Golongan / Ruang adalah sebagai berikut:

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I(IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	4
4.	Penata Tingkat I(III/d)	10
5.	Penata (III/c)	8
6.	Penata Muda Tingkat I(III/b)	8
7.	Penata Muda (III/a)	22
8.	Pengatur Tingkat I(II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	3
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2

(Data per 2 Juni 2020)



- b. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S- 2 (Pasca Sarjana)	6
2.	S- 1 (Sarjana)	27
3.	D- 3 (Diploma Tiga)	12
4.	D- 1 (Diploma Satu)	-
5.	SLTA	10
6.	SLTP	

(Data 2 Juni 2020)

- c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut:

No	Eselonisasi	Jumlah (orang)
1.	Kepala Badan (Eselon II)	1
2.	Sekretaris (Eselon III)	1
3.	Kepala Bidang (Eselon III)	5
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	3
5.	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	15

(Data per 2 Juni 2020)



2 Sarana dan Prasarana

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas- tugas Badan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda 4(empat)	47	-	
2.	Kendaraan Roda 2(dua)	54	-	
3.	Komputer	79	-	
4.	Printer	158	-	
5.	Lap Top	38	-	
6.	Mesin Ketik	10	-	
7.	Personal Computer (PC)	66	-	
8.	Mesin Ketik Elektrik	1	-	
9.	Meja Rapat	19	-	
10.	MejaTulis/Staf	121	-	
11.	Meja KursiTamu	6	-	
12.	MejaTelepon	4	-	
13.	Meja Komputer	25	-	
14.	Meja EselonII	2	-	
15.	Meja Eselon III	2	-	
16.	Meja EselonIV	3	-	



1	2	3	4	5
17.	Kursi Eselon II	1	-	
18.	Kursi Eselon III	2	-	
19.	Kursi Eselon IV	2	-	
20.	Lemari Besi	38	-	
21.	Lemari Kayu	13	-	
22.	Rak Besi	22	-	
23.	Rak Kayu	9	-	
24.	Filling Kabinet	44	-	
25.	Kipas Angin	15	-	
26.	AC	65	-	
27.	Brankas	6	-	
28.	LCD Proyektor + Attachment	5	-	
29.	HandyCam	1	-	
30.	Tabung PMK	3	-	
31.	Meja Receptionis	1	-	
32.	Penjernih Udara(Air Purifier)	14	-	
33.	Handy Talkie (HT)	54	-	
34.	Hardisk Eksternal	2	-	
35.	Werelles	4	-	
36.	Komputer	11	-	
37.	Mainframe/Server UPS Stabilizer	79	-	



1	2	3	4	5
38.	Pesawat Telepon	7	-	
39.	Faximile	1	-	
40.	Tangga Lipat	2	-	
41.	Televisi	23	-	
42.	Kalkulator	8	-	
43.	Etalase Kaca	1	-	
44.	Sound System	2	-	
45.	Kursi Lipat	1	-	
46.	Lemari Buku untuk Arsip Dinamis/Lemari Kaca	6	-	
47.	Camera+Attachment	6	-	
48.	Genset	1	-	
49.	Teralis	1	-	
50.	Almari Es	1	-	
51.	Jam Dinding	5	-	
52.	Kursi Kayu	10	-	
53.	Kursi Tunggu	28	-	
54.	CCTV	1	-	
55.	Dispenser	15	-	
56.	Penghancur Kertas	23	-	
57.	Scanner	2	-	
58.	Meteran Alat Ukur	12	-	



1	2	3	4	5
59.	Mesin Antrian	1	-	
60.	Pompa Air	1	-	
61.	Meja Kecil/RakTV	5	-	
62.	Kursi Rapat/ Putar	52	-	
63.	Sofa	2	-	
64.	Partisi Pembatas Ruang	1	-	
65.	Kursi Hadap	7	-	
66.	Kursi Kerja	132	-	
67.	Home Theater	2	-	
68.	Parabola + Receiver	12	-	
69.	GPS	1	-	

(Data per 3 Januari 2017)

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.



Kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/ barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.1 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.



Keberhasilan pencapaian realisasi pendapatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun rasio peningkatan pendapatan daerah yang paling tertinggi terjadi pada tahun ke-2 penyusunan Renstra BKD yaitu tahun 2014 dimana target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.81.833.186.542,01 terealisasi sebesar Rp.90.012.140.476,19 (109,99%), realisasi yang melebihi target terdapat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 119,59%, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 122,47%, Hasil Retribusi Daerah sebesar 100,17%.



Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Layanan PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	prosentase OPD yang menyusun RKA dan DPA				26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD					
2.	Prosentase ketepatan penerbitan SP2D untuk OPD	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Prosentase penggunaan SAB Dalam penyusunan APBD	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Prosentase OPD yang SP2D Nya diterbitkan tepat waktu	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Prosentase laporan keuangan OPD dan SKPKD yang disusun tepat waktu	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Prosentase OPD yang menyampaikan laporan barang daerah tepat waktu	-	-	-	23 OPD	23 OPD	24 OPD	24 OPD	26 OPD	21 OPD	21 OPD	22 OPD	24 OPD	25 OPD	91.30%	91.30%	91.66%	95.83%	96.15%
8.	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Prosentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Rasio Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.280.148.092	32.367.070.297	37.129.926.700	43.947.726.025	36.920.000.000	27.263.851.800	34.704.036.322	36.656.746.347	39.538.857.598	39.486.329.811	103,74	107,22	98,73	89,97	106,95	35.328.974.223	101,32	
Pendapatan Daerah	17.850.000.000	24.320.000.000	27.520.000.000	30.020.000.000	36.820.000.000	17.123.636.871	23.438.439.086	25.013.398.513	29.628.290.072	39.381.087.311	95,93	96,38	90,89	98,70	106,96	27.306.000.000	97,77	
- Pajak Hotel	630.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	1.950.000.000	345.788.273	455.198.040	638.511.010	790.747.601	2.135.429.967	54,89	65,03	91,22	112,96	109,51	936.000.000	86,72	
- Pajak Restoran	700.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	4.200.000.000	670.954.698	894.849.566	1.391.992.832	2.913.753.440	4.844.087.374	95,85	119,31	185,60	135,52	115,34	1.710.000.000	130,32	
- Pajak Hiburan	300.000.000	350.000.000	350.000.000	900.000.000	1.900.000.000	344.360.408	293.963.050	378.631.195	960.246.067	2.363.915.071	114,79	83,99	108,18	106,69	124,42	760.000.000	107,61	
- Pajak Reklame	405.000.000	405.000.000	405.000.000	405.000.000	650.000.000	138.601.068	196.776.253	250.681.669	469.435.910	810.714.030	34,22	48,59	61,90	115,91	124,73	454.000.000	77,07	
- Pajak Penerangan Jalan	6.500.000.000	7.700.000.000	10.000.000.000	10.500.000.000	12.500.000.000	7.040.380.377	8.702.836.428	10.768.697.485	11.123.393.551	12.934.377.304	108,31	113,02	107,69	105,94	103,48	9.440.000.000	107,69	
- Pajak Parkir			200.000.000	250.000.000	250.000.000			200.728.900	194.404.800	306.142.200			100,36	77,76	122,46	233.333.333	100,19	
- Pajak Air Tanah	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000		7.282.960	12.620.880	18.791.520	20.705.880	48,55	84,14	125,28	138,04	126,59	16.000.000	104,52	
- Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000	500.000.000	200.000.000	200.000.000	50.000.000		3.700.000	11.450.000	3.650.000	11.789.500	0,74	2,29	1,83	5,89	16,42	290.000.000	5,43	
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	300.000.000		358.353.114	164.393.215	189.642.998	211.324.376	119,45	41,10	47,41	52,83	78,61	360.000.000	67,88	
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		4.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000			4.154.152.561	3.791.602.775	3.804.203.157			92,31	68,94	69,17	97,43	5.375.000.000	81,96
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.500.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000		8.214.215.973	8.552.199.093	7.380.468.129	9.128.285.790	96,64	95,02	82,01	101,43	109,68	8.900.000.000	96,95	
Pendapatan Retribusi Daerah		50.000.000	50.000.000	104.000.000	100.000.000		14.503.000	25.815.000	74.498.616	105.242.500		29,01	51,63	71,63	105,24	76.000.000	64,38	
- Pendapatan Retribusi Daerah		50.000.000	50.000.000	104.000.000	100.000.000		14.503.000	25.815.000	74.498.616	105.242.500		29,01	51,63	71,63	105,24	76.000.000	64,38	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.602.022.380	1.596.725.524	1.600.000.000	3.500.000.000		1.602.022.380	1.596.725.524	2.373.951.907	3.221.676.236		100,00	100,00	148,37	92,05		2.074.686.976	113,47	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.828.125.712	6.400.344.773	7.959.926.700	10.323.726.025		8.538.192.549	9.654.368.712	9.243.580.927	6.614.392.673		125,04	150,84	116,13	64,07		7.878.030.802	110,35	
BELANDA DAERAH	45.164.566.600	48.850.131.631	37.791.934.403	60.785.863.379	27.259.693.497	35.609.738.236	38.348.247.464	30.868.002.054	50.227.973.884	22.417.583.660	78,84	78,50	81,68	82,63	82,24	43.970.437.902	80,78	
Belanja Tidak Langsung	32.704.929.125	28.621.721.587	25.643.311.206	49.064.425.293	8.936.099.795	27.963.780.385	24.011.800.834	21.058.377.554	40.631.772.536	7.164.879.107	85,50	83,89	82,12	82,81	80,18	28.994.097.401	82,90	
- Belanja Pegawai	10.206.773.853	12.412.239.235	13.638.623.940	14.470.342.128	8.936.099.795	8.959.389.907	10.679.892.787	11.053.289.852	12.897.730.142	7.164.879.107	87,78	86,04	81,04	89,13	80,18	11.932.815.790	84,84	
- Belanja Bunga	641.180.620	650.000.000				201.081.288	545.277.778				31,36	83,89				645.590.310	57,62	
- Belanja Hibah	17.935.703.500	11.687.000.000	8.324.720.000	31.694.189.000		16.628.273.500	10.682.935.500	7.515.076.772	26.017.018.900		92,71	91,41	90,27	82,09		17.410.403.125	89,12	
- Belanja Bantuan Sosial	1.429.500.000	1.763.511.200	1.195.280.000	683.940.000		1.329.500.000	1.466.860.000	1.112.280.000	683.940.000		93,00	83,18	93,06	100,00		1.268.057.800	92,31	
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan desa dan Partai Politik	991.771.152	658.971.152	1.034.687.266	1.045.954.165			597.971.152	636.834.769	954.523.126	958.287.046	60,29	96,64	92,25	91,62		932.845.934	85,20	
- Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.170.000.000			247.564.538	-	423.207.804	74.796.448	16,50	-	29,19	6,39		1.392.500.000	13,02	



Belanja Langsung	12.459.637.475	20.228.410.044	12.148.623.197	11.721.438.086	18.323.593.702	7.645.957.851	14.336.446.630	9.809.624.500	9.596.201.348	15.252.704.553	61,37	70,87	80,75	81,87	83,24	14.976.340.501	75,62	
Rincian Program																		
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.521.704.250	2.610.204.655	2.936.892.551	2.718.081.313	3.116.855.561	1.826.800.805	1.931.254.774	2.585.835.749	2.572.241.429	2.930.461.812	72,44	73,99	88,05	94,63	94,02	2.780.747.666	84,63	
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.737.750.000	9.568.275.000	1.758.697.500	1.283.700.000	9.517.000.000	2.161.988.400	8.660.188.300	1.398.254.105	1.265.388.450	8.227.975.820	78,97	90,51	79,51	98,57	86,46	4.973.084.500	86,80	
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	122.861.200	97.081.200	8.000.000	37.800.000	56.231.500	112.661.200	71.733.200	6.480.000	34.843.825	55.301.050	91,70	73,89	81,00	92,18	98,35	64.394.780	87,42	
- Program Penguatan Transparansi Publik	4.600.000	4.600.000	5.000.000	7.000.000	17.000.000	4.600.000	4.600.000	5.000.000	7.000.000	17.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.640.000	100,00	
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.861.802.325	3.707.104.459	5.140.341.266	4.360.430.906	2.943.549.941	1.570.714.446	2.424.603.256	4.159.253.146	3.565.355.796	2.170.181.441	54,89	65,40	80,91	81,77	73,73	3.802.645.779	71,34	
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				54.185.550					-							54.185.550	-	
- Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	1.925.337.200	2.343.254.280	2.036.268.180	2.888.510.617	2.273.009.400	947.206.000	1.232.842.100	1.547.011.800	2.104.496.348	1.732.536.930	49,20	52,61	75,97	72,86	76,22	2.293.275.935	65,37	
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah			243.423.700	371.729.700	377.241.700			89.189.700	46.875.500	96.541.900			36,64	12,61	25,59	330.798.367	24,95	
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.250.000		20.000.000			15.732.000		18.600.000			91,20		93,00			18.625.000	92,10	
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					22.705.600					22.705.600					100,00	22.705.600	100,00	
- Program Peningkatan Penganganan Kasus-kasus Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	33.590.450	97.890.450														65.740.450		
- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.234.742.050					1.006.255.000					45,03					2.234.742.050	45,03	
- Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian		1.800.000.000					11.225.000					0,62				1.800.000.000	0,62	



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan

Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi Komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku



b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi;
3. Kurangnya sistem pengembangan SDM yang ada;
4. Masih kurangnya perda sebagai payung hukum dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Kuantitas bimtek pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) kepada staf sangat rendah, baik formal maupun informal;
6. Perangkat hukum untuk mendukung penerapan sanksi kepada wajib pajak belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan yang ada;
7. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak/wajib retribusi dan perlunya dilakukan kajian dan evaluasi terhadap tarif pemungutan pendapatan asli daerah (PAD);
8. Kurang tegasnya kebijakan dari pemerintah kota untuk menegakkan perda retribusi jasa umum.



2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/ Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)serta pengelolaan asset/ barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

b. Tantangan/ Ancaman (*Treath*)

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan



- benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah pada PD;
4. Kurangnya jumlah PNS yang memiliki sertifikasi khusus pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 5. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya;
 6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pajak asli daerah.

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD

Tujuan dari Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang terhadap tujuan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah meningkatnya pengelolaan keuangan daerah hal ini sejalan dengan tujuan Renstra Kementrian/Lembaga .



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, maka peranan BKD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, antara lain :



1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
2. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Adanya pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota dengan sistem pengelolaan keuangan Provinsi;
4. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/ kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;
5. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Bengkayang yang berlokasi di Kota Singkawang. Sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang secara penuh sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan aset dimaksud



dan aset menjadi tidak terawat/ rusak. Untuk itu diharapkan agar dapat dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemukakan dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.



Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022 bahwa Visi Pembangunan Kota Singkawang yang ditetapkan untuk tahun 2018-2022 adalah **"Singkawang HEBAT 2022"**

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut :

- a. **H**armonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **A**dil dan Merata dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (Tujuh) Misi Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kota Singkawang tersebut, Badan Keuangan Kota Singkawang



Sebagai unsur yang mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKD Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis PD (Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BKD Kota Singkawang serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi keempat: **"Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi"** dengan program prioritas Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur pelayanan publik;
2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik;



3. Menata dan meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis TI;
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pelayanan publik;
5. Melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah;
6. Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah;
7. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah;
8. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah;
9. Menata kelembagaan pengelolaan keuangan;
10. Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:



Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi</p> <p>Program Prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur pelayanan publik 2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik 3. Menata dan meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis TI 4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pelayanan publik 5. Melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah 6. Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah 7. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah 8. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah 9. Menata kelembagaan pengelolaan keuangan 10. Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD b. Masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang yang berlokasi di Kota Singkawang sampai saat ini belum diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Singkawang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perbandingan jumlah PNS yang pensiun dengan pengadaan tidak sebanding b. SDM yang ditunjuk di OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah <p>Pemanfaatan dan pemeliharaan aset milik Pemerintah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang kurang optimal sehingga mengakibatkan aset tersebut kurang/ tidak terawat/ rusak</p>	<p>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan barang daerah di OPD melalui pelatihan/pembinaan yang dilakukan dengan insentif dan efektif</p> <p>Mengajukan permohonan penyerahan pengalihan aset dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal</p>



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **"Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi"**. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah "Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik". Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Badan Keuangan Daerah memiliki tujuan yaitu meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang, kedepan Kota Singkawang berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang adalah :

1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);



2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. Sebagai pedoman dalam perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah;
4. Sebagai Acuan bagi Instansi Pemerintah, para Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam Pemanfaatan ruang di Kota Singkawang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2012-2032, beberapa Kawasan Strategis di Kota Singkawang antara lain meliputi :

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi yaitu;
 - a. Kawasan Pusat Kota di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah;
 - b. Kawasan Muara Sungai Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - c. Kawasan Nyarumkop-Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang Timur.
2. Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam/atau Teknologi Tinggi yaitu;
 - a. Kawasan Peternakan dan Pertanian terpadu di Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - b. Kawasan Bandara di Kecamatan Singkawang Selatan.
3. Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Sosial yaitu Kawasan Permukiman Bukit Batu di Kecamatan Singkawang Tengah dan Naram di Kecamatan Singkawang Utara.



Berdasarkan Telaah RTRW Kota Singkawang tahun 2018-2022 tersebut diatas dimaksudkan agar Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Keuangan Daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Badan Keuangan Daerah memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatnya resiko perubahan iklim, meningkatnya kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatnya intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis (gambut), menurunkan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/ atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatnya jumlah penduduk miskin atau



terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatnya resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BKD memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD Kota Singkawang terdapat 40 program prioritas yang perlu dilakukan karena pelaksanaannya berdampak pada lingkungan, meliputi :

- 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dan Jembatan
- 2 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
- 3 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
- 4 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
- 5 Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
- 6 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 7 Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku
- 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
- 9 Program Pengendalian Banjir
- 10 Program Pembangunan Infrastruktur Bangunan Pemerintah
- 11 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum



- 12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 13 Program Pemanfaatan Tata Ruang (Rth)
- 14 Program Revitalisasi Penyediaan Air Bersih
- 15 Program Pengembangan Perumahan
- 16 Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
- 17 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan
- 18 Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 19 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- 20 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 21 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 22 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 23 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
- 24 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- 25 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup
- 26 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
- 27 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
- 28 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 29 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
- 30 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
- 31 Program Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Transportasi Daerah Strategis Dan Cepat Tumbuh
- 32 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan
- 33 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 34 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 35 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan



- 36 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
- 37 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/
Perkebunan
- 38 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 39 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 40 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi KLHS. Dalam dokumen KLHS tidak ditemui program Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah sebagai unsur yang melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah juga melaksanakan tugas lain, sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;



- c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Mengesahkan DPA-PD;
- e. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- f. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Menetapkan SPD;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya Badan Keuangan Daerah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang mulai dari:

- a. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA/ RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana;



c. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan selaku entitas akuntansi.

2. Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan PD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra PD adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Mendasari sasaran kedua dari misi keempat pada RPJMD BAB VI Tabel 6.1 **Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan** yaitu “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah” serta indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, maka strategi jangka menengah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah.
3. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah; dan
4. Menata kelembagaan pengelolaan keuangan.

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran



sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPJMD dengan spesifikasi antara lain:

1. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;
3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tercantum uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, mempunyai tugas Perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018–2022 melalui penyusunan isu-isu strategis/ program prioritas.



Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis PD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi PD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Isu strategis/ program prioritas PD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara PD dengan program-program Pemerintah Daerah. Spesifikasi isu-isu strategis/program prioritas PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan PD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan visi dan misi jangka menengah Kota Singkawang merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kota Singkawang harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Kota Singkawang. Jadi visi Pemerintah Kota Singkawang adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawah kemana Kota Singkawang dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Adapun visi Kota Singkawang adalah : “ **Singkawang HEBAT 2022**” Misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kota Singkawang.



Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka Pemerintah Kota Singkawang menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan memelihara Harmonisasi dalam keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

Dari Misi Pemerintah Kota Singkawang tersebut diatas Badan Keuangan Daerah masuk dalam Misi ke-4 **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi”**.



Perwujudan dari misi tersebut dapat dijabarkan dengan strategi jangka menengah sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah.
3. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah; dan
4. Menata kelembagaan pengelolaan keuangan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang dalam RPJMD yaitu: ***“Meningkatkan***



Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran Badan Keuangan Daerah sesuai dengan visi dan misi dalam RPJMD Pemerintah Kota Singkawang adalah ***“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah”*** dan ***“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)”***. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.1
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD)		opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan	14,99	15,87	16,60	17,14	17,63
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,82	11,64	8,58	7,89	7,32



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar dapat diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi dan Arah Kebijakan disusun berdasarkan dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi dalam lima tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal pada lingkungan pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

Visi : Singkawang Hebat 2022		
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi		
Tujuan:	:	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik
Sasaran	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Strategis	:	Meningkatkan pengelolaan Keuangan Daerah
Arah Kebijakan	:	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah• Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah• Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah• Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah• Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
Tujuan Badan Keuangan Daerah	Sasaran Badan Keuangan Daerah	Arah Kebijakan BKD
Meningkatkan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Pengelolaan	1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah
---	---	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018 -2022. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah adalah Sebagai berikut :



Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2018-2020

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2020)			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Persentase PAD terhadap pendapatan	15,62%	14,99%	14.233.910.597,00	15,87%	14.752.514.576,85	16,60%	15.522.874.055,69	17,14%	16.264.647.320,98	17,63%	17.104.013.071,40	17,63%	77.884.333.278,17		
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Daerah yang disusun (%)	7	7	3.299.210.601	7	3.468.290						7	3.302.678.891	Singkawang	
				Persentase SILPA terhadap APBD (%)	3,23	0		0							0		Singkawang	
				Persentase aset-aset daerah yang terdata	100	100		100		100					100			
				Persentase OPD yang menyusun RKA dan DPA tepat Waktu (%)						100					100			
				Cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target						100	1.629.026				100			
				Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu						10					100			
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang	2 perda	1 perda	130.388.000	1 perda	136.907.400,00	1 perda	143.752.770,00				3 Perda	411.048.170,00	Singkawang
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD	2 perwako	1 perwako	80.170.200	1 perwako	84.178.710,00	1 perwako	88.387.645,50				3 Perwako	252.736.555,50	Singkawang
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD	1 perda	1 perda	50.159.500	1 perda	52.667.475,00	1 perda	55.300.848,75				3 perda	158.127.823,75	Singkawang
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran	Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran APBD	1 perwako	1 perwako	34.964.500	1 perwako	36.712.725,00	1 perwako	38.548.361,25				3 perwako	110.225.586,25	Singkawang	



Perubahan APBD															
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	1 perda	1 perda	91.958.325	1 perda	96.556.241,25	1 perda	101.384.053,31					3 perda	289.898.619,56	Singkawang
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perwako tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	1 perwako	1 perwako	34.201.000	1 perwako	35.911.050,00	1 perwako	37.706.602,50					3 perwako	107.818.652,50	Singkawang
Pengamanan Barang Milik Daerah	cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan	2 kegiatan	100%	576.683.000	100%	605.517.150,00	100%	635.793.007,50					100%	1.817.993.157,50	Singkawang
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	5 dokumen	5 dokumen	99.981.000	5 dokumen	104.980.050,00	5 dokumen	110.229.052,50					15 dokumen	315.190.102,50	Singkawang
Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	cakupan Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	1 buku/dokumen	1 dokumen	19.883.000	1 dokumen	20.877.150,00	1 dokumen	21.921.007,50					3 dokumen	62.681.157,50	Singkawang
Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD	cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan	5.811 SP2D	5.321 SP2D	75.620.750	5.321 SP2D	79.401.787,50	5.321 SP2D	83.371.876,88					15.963 SP2D	238.394.414,38	Singkawang
Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer	Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer	4 laporan	4 laporan	18.360.700	4 laporan	19.278.735,00	4 laporan	20.242.671,75					12 laporan	57.882.106,75	Singkawang
Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang	Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS	476 database	14 bulan	60.405.050	14 bulan	63.425.302,50	14 bulan	66.596.567,63					42 Bulan	190.426.920,13	Singkawang
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa RKBMD, RKPPMD, Laporan Semester dan Tahunan Barang	2 dokumen	2 dokumen	26.603.300	2 dokumen	27.933.465,00	2 dokumen	29.330.138,25					6 dokumen	83.866.903,25	Singkawang
Facilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 perangkat	1 perangkat	211.425.200	1 perangkat	221.996.460,00	1 perangkat	233.096.283,00					3 perangkat	666.517.943,00	Singkawang
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 laporan	1 dokumen	16.196.350	1 dokumen	17.006.167,50	1 dokumen	17.856.475,88					5 dokumen	51.058.993,38	Singkawang
Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	160 orang	100 orang	44.199.900	100 orang	46.409.895,00	100 orang	48.730.389,75					500 orang	139.340.184,75	Singkawang
Serah Terima Aset	Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset	1 dokumen	1 dokumen	27.681.200	1 dokumen	29.065.260,00	1 dokumen	30.518.523,00					5 dokumen	87.264.983,00	Singkawang
Facilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	1 aplikasi	1 aplikasi	573.478.351	1 aplikasi	602.152.268,55	1 aplikasi	632.259.881,98					5 aplikasi	1.807.890.501,53	Singkawang
FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah OPD peserta workshop	26 opd	26 opd	130.303.475	26 opd	136.818.648,75	26 opd	143.659.581,19					130 OPD	410.781.704,94	Singkawang
Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	1 paket	1 paket	26.773.250	1 paket	28.111.912,50	1 paket	29.517.508,13					5 paket	84.402.670,63	Singkawang
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan	18 laporan	18 laporan	220.218.400	18 laporan	231.229.320,00	18 laporan	242.790.786,00					90 laporan	694.238.506,00	Singkawang
Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	100%	100%	26.466.000	100 %	27.789.300,00	100 %	29.178.765,00					100%	83.434.065,00	Singkawang
Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	1 dokumen	1 dokumen	19.834.000	1 dokumen	20.825.700,00	1 dokumen	21.866.985,00					5 dokumen	62.526.685,00	Singkawang
Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak	12 bulan/laporan	12 laporan	10.964.350	12 laporan	11.512.567,50	12 laporan	12.088.195,88					60 laporan	34.565.113,38	Singkawang



Pegawai/Pihak Ketiga	Ketga															
Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD	Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda	6 dokumen	6 dokumen	7.999.800	6 dokumen	8.399.790,00	6 dokumen	8.819.779,50						30 dokumen	25.219.369,50	Singkawang
Pengeditan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD	12 bulan	12 bulan/laporan	19.577.300	12 bulan/laporan	20.556.165,00	12 bulan/laporan	21.583.973,25						60 laporan	61.717.438,25	Singkawang
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD	Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD	6 dokumen	6 dokumen	7.999.850	6 dokumen	8.399.842,50	6 dokumen	8.819.834,63						30 dokumen	25.219.527,13	Singkawang
Distribusi Barang Milik Daerah	Jumlah Distribusi Barang Milik Daerah ke OPD	12 OPD	21 opd	16.885.500	21 opd	17.729.775,00	21 opd	18.616.263,75						105 OPD	53.231.538,75	Singkawang
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Kodefikasi BMD	1 dokumen	1 dokumen	27.189.800	1 dokumen	28.549.290,00	1 dokumen	29.976.754,50						5 dokumen	85.715.844,50	Singkawang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	13.160.000	1 dokumen	13.818.000,00	1 dokumen	14.508.900,00						5 dokumen	41.486.900,00	Singkawang
Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran	160 orang	160 orang	101.104.500	160 orang	106.159.725,00	160 orang	111.467.711,25						800 orang	318.731.936,25	Singkawang
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2019	Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri	-	26 OPD	85.000.000	26 OPD	89.250.000,00	26 OPD	93.712.500,00						130 OPD	267.962.500,00	Singkawang
Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Permendagri	-	120 orang	98.683.350,00	120 orang	103.617.517,50	120 orang	108.798.393,38						600 orang	311.099.260,88	Singkawang
Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan	Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan	2 dokumen	1 dokumen	44.691.700,00	1 dokumen	46.926.285,00	1 dokumen	49.272.599,25						5 dokumen	140.890.584,25	Singkawang
Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah	1 dokumen	1 dokumen	175.000.000,00	1 dokumen	183.750.000,00	1 dokumen	192.937.500,00						1 dokumen	551.687.500,00	Singkawang
Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD	Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	26 OPD	26 OPD	95.000.000,00	26 OPD	99.750.000,00	26 OPD	104.737.500,00						26 OPD	299.487.500,00	Singkawang
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	27,93	0,82	2.915.746	11,64	2.958.790.000,00		1.581.969						11,64	2.963.287.715,00	Singkawang
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)								100					100	0,00	Singkawang
									100					100	0,00	Singkawang
															0,00	Singkawang
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	1 dokumen	1 dokumen	201.922.350,00	1 dokumen	212.018.467,50	1 dokumen	222.619.390,88						5 dokumen	636.560.208,38	Singkawang
Penerbitan Izin Pemasangan Reklame	Jumlah Penerbitan Izin Pemasangan Reklame	1 dokumen	1 dokumen	121.260.200,00	1 dokumen	127.323.210,00	1 dokumen	133.689.370,50						5 dokumen	382.272.780,50	Singkawang
Rapat Koordinasi Pendataan Asli Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Pendataan Asli Daerah	2 dokumen	2 dokumen	38.966.700,00	2 dokumen	40.915.035,00	2 dokumen	42.960.786,75						10 dokumen	122.842.521,75	Singkawang
Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2	1 dokumen	1 dokumen	175.843.000,00	1 dokumen	184.635.150,00	1 dokumen	193.866.907,50						5 dokumen	554.345.057,50	Singkawang
Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	2 dokumen	1 dokumen	167.903.800,00	1 dokumen	176.298.990,00	1 dokumen	185.113.939,50						5 dokumen	529.316.729,50	Singkawang
Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan	Jumlah Dokumen Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak	4 dokumen	4 dokumen	336.975.600,00	4 dokumen	353.824.380,00	4 dokumen	371.515.599,00						20 dokumen	1.062.315.579,00	Singkawang



Pajak air Tanah	Hiburan dan Pajak air Tanah													
Penerbitan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Penerimaan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	184.546.200,00	1 dokumen	193.773.510,00	1 dokumen	203.462.185,50				5 dokumen	581.781.895,50	Singkawang
Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2	Jumlah Perwako PBB-P2	-	1 perwako	26.595.325,00	1 perwako	27.925.091,25	1 perwako	29.321.345,81				5 perwako	83.841.762,06	Singkawang
Pencetakan Masal SPPT dan DHKP PBB-P2	Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2	65.000 SPPT	75.000 SPPT	136.774.050,00	75.000 SPPT	143.612.752,50	75.000 SPPT	150.793.390,13				375.000 SPPT	431.180.192,63	Singkawang
Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	175.167.000,00	1 dokumen	183.925.350,00	1 dokumen	193.121.617,50				5 dokumen	552.213.967,50	Singkawang
Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah	1 basis data	1 basis data	670.335.500,00	1 basis data	703.852.275,00	1 basis data	739.044.888,75				5 basis data	2.113.232.663,75	Singkawang
Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	1 dokumen	2 dokumen	147.630.500,00	2 dokumen	155.012.025,00	2 dokumen	162.762.626,25				10 dokumen	465.405.151,25	Singkawang
Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak	Jumlah produk hukum pajak daerah	1 perda, 2 perwako	1 perda, 2 perwako	14.419.200,00	1 perda, 2 perwako	15.140.160,00	1 perda, 2 perwako	15.897.168,00				5 perda, 10 perwako	45.456.528,00	Singkawang
Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi	-	2 dokumen	317.290.200,00	2 dokumen	333.154.710,00	2 dokumen	349.812.445,50				10 dokumen	1.000.257.355,50	Singkawang
Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah	-	2 dokumen	200.116.750,00	2 dokumen	210.122.587,50	2 dokumen	220.628.716,88				10 dokumen	630.868.054,38	Singkawang
Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2	Jumlah dokumen Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2	-	-	-	1 dokumen	200.133.450,00	1 dokumen	210.140.122,50				4 dokumen	#VALUE!	Singkawang
Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase penyelenggaraan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah	25,59%	100%	377.242	100	381.770	100	0				100	759.012,00	Singkawang
Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2	Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan	30.000 OP	30.000 op	377.241.700,00	30.000 op	396.103.785,00	30.000 op	415.908.974,25				150.000 OP	1.189.254.459,25	Singkawang
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu											100		
	Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah Sesuai Target											100		
	Persentase OPD Yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu											100		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset-aset Daerah yang terdata											100		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Sektor PBB dan BPHTB											20,9		
	Persentase peningkatan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) serta retribusi daerah											4,8		
Urusan Penunjang Keuangan				14.233.910.597,00		14.752.514.576,85		15.522.874.055,69					44.509.299.229,54	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat Nilai Sakip												0,00	
Pelayanan Administrasi	Persentase unit kerja internal yang	100%	100%	2.905.743.471	100%	3.051.030.645	100%	3.203.582.176,78				100%	9.160.356.292,78	



Perkantoran	terlayani dengan baik													
Administrasi Umum	Cakupan Administrasi umum yang dilaksanakan													0,00
Penyediaan jasa surat menyurat	cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%	100%	4.500.000	100%	4.725.000,00	100%	4.961.250,00					100%	14.186.250,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	100%	501.420.950	100%	526.491.997,50	100%	552.816.597,38					100%	1.580.729.544,88
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%	100%	210.000.000	100%	220.500.000,00	100%	231.525.000,00					100%	662.025.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%	100%	220.000.000	100%	231.000.000,00	100%	242.550.000,00					100%	693.550.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	100%	100%	12.854.250	100%	13.496.962,50	100%	14.171.810,63					100%	40.523.023,13
Penyediaan Alat Tulis Kantor	cakupan jasa Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%	100%	109.149.050	100%	114.606.502,50	100%	120.336.827,63					100%	344.092.380,13
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	100%	58.902.825	100%	61.847.966,25	100%	64.940.364,56					100%	185.691.155,81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	100%	220.000.000	100%	231.000.000,00	100%	242.550.000,00					100%	693.550.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	6.250.000	100%	6.562.500,00	100%	6.890.625,00					100%	19.703.125,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	100%	100%	73.500.000	100%	77.175.000,00	100%	81.033.750,00					100%	231.708.750,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	100%	100%	1.081.153.116	100%	1.135.210.771,80	100%	1.191.971.310,39					100%	3.408.335.198,19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan	100%	100%	358.013.280	100%	375.913.944,00	100%	394.709.641,20					100%	1.128.636.865,20
Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah	cakupan Tamu daerah yang disediakan fasilitasnya	100%	100%	50.000.000	100%	52.500.000,00	100%	55.125.000,00					100%	157.625.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	100%	4.349.877.000	100%	4.567.370.850	100%	4.795.739.392,50					100%	13.712.987.242,50
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100%	100%	719.000.000,00	100%	754.950.000,00	100%	792.697.500,00					100%	2.266.647.500,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100%	100%	704.750.000,00	100%	739.987.500,00	100%	776.986.875,00					100%	2.221.724.375,00
Pengadaan peralatan gedung kantor	cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan	100%	100%	615.000.000,00	100%	645.750.000,00	100%	678.037.500,00					100%	1.938.787.500,00
Pengadaan Tanah	cakupan Pengadaan Tanah yang diadakan	100%	100%	1.657.627.000,00	100%	1.740.508.350,00	100%	1.827.533.767,50					100%	5.225.669.117,50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100%	100%	350.000.000,00	100%	367.500.000,00	100%	385.875.000,00					100%	1.103.375.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	100%	208.500.000,00	100%	218.925.000,00	100%	229.871.250,00					100%	657.296.250,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	95.000.000,00	100%	99.750.000,00	100%	104.737.500,00					100%	299.487.500,00



Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	-	100%	151.500.000,00	100%	57.750.000,00	100%	84.341.250,00					100%	293.591.250,00	Singkawang
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	-	65 stel	55.000.000,00	65 stel	57.750.000,00	-	-					100%	112.750.000,00	Singkawang
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	-	65 stel	96.500.000,00	-	-	65 pegawai	84.341.250,00					100%	180.841.250,00	Singkawang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase penyusunan PAK tenaga fungsional meningkat	100%	100%	150.000.000	100%	157.500.000	100%	165.375.000					100%	472.875.000,00	Singkawang
Pendidikan dan pelatihan formal	cakupan Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	100%	50.000.000	100%	52.500.000,00	100%	55.125.000,00					100%	157.625.000,00	Singkawang
Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	cakupan peserta yang mengikuti bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	-	100%	100.000.000	100%	105.000.000,00	100%	110.250.000,00					100%	315.250.000,00	Singkawang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	64.591.450,00	100%	59.421.022,50	100%	71.422.073,63					100%	195.434.546,13	Singkawang
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	8.400.000,00	1 dokumen	8.820.000,00					100%	25.220.000,00	Singkawang
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	7.991.450,00	1 dokumen	8.391.022,50	1 dokumen	8.810.573,63					100%	25.193.046,13	Singkawang
Penyusunan LAKIP SKPD	Dokumen LAKIP SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	8.400.000,00	1 dokumen	8.820.000,00					100%	25.220.000,00	Singkawang
Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.600.000,00	1 dokumen	0	1 dokumen	9.030.000,00					100%	17.630.000,00	Singkawang
Penyusunan LPPD / LKPJ	Dokumen LPPD / LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	8.400.000,00	1 dokumen	8.820.000,00					100%	25.220.000,00	Singkawang
Penyusunan Profil SKPD	Dokumen Profil SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	8.400.000,00	1 dokumen	8.820.000,00					100%	25.220.000,00	Singkawang
Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	2 dokumen	2 dokumen	8.000.000,00	2 dokumen	8.400.000,00	2 dokumen	8.820.000,00					100%	25.220.000,00	Singkawang
Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	9.030.000,00	1 dokumen	9.481.500,00					100%	26.511.500,00	Singkawang
Program Penguatan Transparansi Publik	Persentase transparansi publik	100%	100%	25.000.000		21.000.000,00		22.050.000,00					100%	68.050.000,00	Singkawang
Expo Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan Expo	1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000,00	1 kegiatan	21.000.000,00	1 kegiatan	22.050.000,00					100%	68.050.000,00	Singkawang



Tabel 6.2

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2022)			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)																		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat Nilai Sakip									BB	16.903.860.295	BB	18.207.999.310			
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun									100%	47.500.000	100%	49.875.000	200%		
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah									2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.750.000	4 dokumen		
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat daerah									1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	13.125.000	2 dokumen		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja									4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	21.000.000	8 dokumen		
		Administrasi Keuangan	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun									100%	11.037.860.295	100%	11.596.599.310	200%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangan									100%	11.025.380.295	100%	11.576.649.310	200%		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									2 Dokumen	6.240.000	2 Dokumen	9.975.000	4 dokumen		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun									5 Dokumen	6.240.000	5 Dokumen	9.975.000	10 dokumen			
	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum									100 %	5.593.500.000	100 %	6.300.525.000	200%			

WTP



Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan						100 %	5.500.000	100 %	5.775.000	200%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan						100%	520.500.000	100%	609.525.000	200%		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan						100%	205.000.000	100%	256.200.000	200%		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan						100%	255.000.000	100%	267.750.000	200%		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan						100%	15.000.000	100%	15.750.000	200%		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan						100%	125.000.000	100%	131.250.000	200%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan						100%	60.000.000	100%	71.400.000	200%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						100%	200.000.000	100%	262.500.000	200%		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						100%	7.500.000	100%	7.875.000	200%		
Penyediaan Makanan dan Minuman	cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan						100%	90.000.000	100%	94.500.000	200%		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan						100%	1.250.000.000	100%	1.312.500.000	200%		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan						12 Unit	650.000.000	13 Unit	892.500.000	25 Unit		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan						25 Unit	750.000.000	26 Unit	840.000.000	51 Unit		
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan						25 Unit	700.000.000	26 Unit	735.000.000	51 Unit		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	cakupan Gedung Kantor yang dipelihara						100%	400.000.000	100%	420.000.000	200%		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan						100%	250.000.000	100%	262.500.000	200%		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara						100%	110.000.000	100%	115.500.000	200%		
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur						100%	225.000.000	100%	261.000.000	200%		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan						75 stel	65.000.000	75 Stel	0	75 stel		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan						85 Stel	0	85 Stel	93.000.000	85 stel		
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta diklat formal							160.000.000	100%	168.000.000	200%		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu						100%	1.687.086.705	100%	1.982.868.000	200%		
	Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah Sesuai Target						100%		100%		200%		



	Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu							100%		100%		200%		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Anggaran tepat Waktu							100%		100%		200%		
								100%	792.926.705	100%	867.200.000	200%		
Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang disusun							2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	52.500.000	4 dokumen		
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen yang disusun							2 dokumen	50.000.000	2 Dokumen	52.500.000	4 dokumen		
Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Persentase DPA dan DPA Perubahan SKPD yang dilakukan review							100%	30.637.705	100%	32.200.000	200%		
Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen yang disusun							2 dokumen	243.747.400	2 dokumen	256.000.000	4 dokumen		
Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen yang disusun							2 dokumen	98.541.600	2 dokumen	103.500.000	4 dokumen		
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen yang disusun							1 Dokumen	110.000.000	1 dokumen	115.500.000	2 dokumen		
Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD							2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	150.000.000	4 dokumen		
Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi							3 regulasi	30.000.000	3 regulasi	35.000.000	6 regulasi		
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen							2	30.000.000	2	35.000.000	4		
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen							2	30.000.000	2	35.000.000	4		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target							95 %	394.160.000	100%	418.868.000	195%		
Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Realisasi Dana Transfer							4 laporan	21.500.000	4 laporan	22.575.000	8 laporan		
Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan							100%	90.500.000	100%	95.025.000	200%		
Koordinasi Pelaksanaan dan Penelibitan Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji serta Penerbitan SKPP	Jumlah dokumen yang disusun							12 dokumen	95.000.000	12 dokumen	99.750.000	24 dokumen		
Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga							12 laporan	12.700.000	12 laporan	13.335.000	24 laporan		



Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah dokumen yang disusun							1 dokumen	51.500.000	1 dokumen	54.075.000	2 dokmen		
Pelaksanaan Pengendalian dan Penyerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana							4 dokumen	22.960.000	4 dokumen	24.108.000	8 dokumen		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan							12 laporan	50.000.000	12 laporan	55.000.000	24 laporan		
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Laporan							12 laporan	50.000.000	12 laporan	55.000.000	24 laporan		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu							100%	500.000.000	100%	696.800.000	200%		
Koordinasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen yang disusun							1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	41.500.000	2 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Proinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun							1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	115.000.000	2 dokumen		
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan yang disusun							7 laporan	200.000.000	7 laporan	277.000.000	14 laporan		
Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi							29 OPD	100.000.000	29 OPD	158.300.000	58 OPD		
Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembayaran	Jumlah Laporan							12 laporan	30.000.000	12 laporan	35.000.000	24 laporan		
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan							12 laporan	30.000.000	12 laporan	35.000.000	24 laporan		
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen							2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	35.000.000	4 dokumen		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset-aset daerah yang terdata							100%	1.377.423.100	100%	1.446.805.000	200%		
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD pada dokumen OPD yang sesuai regulasi							100%	1.377.423.100	100%	1.446.805.000	200%		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen RKBMD							100%	15.800.000	100%	16.590.000	200%		



Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun							2 dokumen	370.100.000	2 dokumen	388.605.000	4 dokumen		
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun							1 dokumen	72.500.000	1 dokumen	76.125.000	2 dokumen		
Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun							1 dokumen	687.582.600	1 dokumen	722.000.000	2 dokumen		
Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun							1 dokumen	32.500.000	1 dokumen	34.125.000	2 dokumen		
Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun							4 dokumen	115.740.500	4 dokumen	122.000.000	8 dokumen		
Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun							1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	33.600.000	2 dokumen		
Koordinasi Pelaksanaan Reonsiliasi alam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan yang disusun							12 laporan	51.200.000	12 laporan	53.760.000	24 laporan		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah sektor PBB dan BPHTB							100%	4.126.300.000	100%	4.332.615.000	200%		
Perencanaan, Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) serta Retribusi Daerah							8.50%	4.126.300.000	8,50%	4.332.615.000	17%		
Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun							1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	136.500.000	2 dokumen		
Penyusunan Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen yang disusun							2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	210.000.000	4 dokumen		
Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen yang disusun							1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.500.000	2 dokumen		
Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen yang disusun							2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	68.250.000	4 dokumen		
Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah dokumen yang disusun							1 dokumen	367.000.000	1 dokumen	385.350.000	2 dokumen		
Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak							50 Laporan	35.000.000	50 Laporan	36.750.000	100 laporan		
Penyenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang diselenggarakan							1 Aplikasi	1.528.000.000	1 Aplikasi	1.604.400.000	2 Aplikasi		
Pemeliharaan dan Pemuktahiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Pemuktahiran Basis data pajak daerah dan retribusi daerah (memperbarui basis data wp baru)							12 Kali	965.500.000	12 Kali	1.013.775.000	24 kali		



	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah							3 Laporan	200.800.000	3 Laporan	210.840.000	6 laporan		
	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi							197 Laporan	625.000.000	197 Laporan	656.250.000	394 Laporan		
	JUMLAH									24.094.670.100		25.970.287.310			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sangat berkaitan erat dengan dokumen RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2022.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk lima (5) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1.



Tabel 7.1
**Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang
Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	27,93	0,82	11,64	8,58	7,89	7,32	41,5
3.	Jumlah Dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah yang terdata	7	7	7				7
4.	Persentase SiLPA terhadap APBD	3,23	0,00	0,00				0,00
5.	Persentase Aset-aset daerah yang terdata	100%	100%	100%	100%			100%
6.	Persentase OPD yang menyusun RKA dan DPA tepat Waktu				100%			100%
7.	Cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target				100%			100%
8.	Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan keuangan tepat Waktu				100%			100%
9.	Persentase Pengelolaan keuangan daerah	100	100	100	100			100



10.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(%)	27,93	0,82	11,64				11,64
11.	Persentase peningkatan pajak daerah sektor PBB dan BPHTB				100			100
12.	Persentase peningkatan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) serta retribusi daerah				100			100
13.	Persentase penyelenggaraan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah	25,59	100	100	100			100
14.	Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu					100	100	100
15.	Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah Sesuai Target					100	100	100
16.	Persentase OPD Yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu					100	100	100
17.	Persentase Aset-aset Daerah yang Terdata					80	100	100
18.	Persentase peningkatan pajak daerah sektor PBB dan BPHTB					19,9	20,9	20,9
19.	Persentase peningkatan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) serta retribusi daerah					18,1	4,8	4,8



BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran- sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan disusunnya RENSTRA PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan Renja PD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

RENSTRA BKD ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BKD diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2018-2022 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/ RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan diperlukan adanya :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA PD BKD.

Singkawang, Juli 2020
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

Dr. Zulhiar
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198908 1 001